BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga perbankan adalah salah satu dari banyaknya perusahaan yang mulai muncul di sektor keuangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan diartikan sebagai entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari nasabah dalam wujud simpanan lalu mengalirkannya kembali kepada nasabah dalam bentuk pinjaman atau layanan lainnya dengan tujuan memajukan kesejahteraan banyak orang. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan atau bank bertujuan untuk membantu serta mempermudah berbagai keperluan masyarakat (Kasmir, 2014).

Di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terdapat peluang besar bagi industri perbankan syariah untuk berkembang dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dampak besar dari persaingan ekonomi global juga dirasakan oleh sektor industri perbankan. Karenanya, diinginkan agar sektor perbankan di Indonesia dapat mengembangkan inovasi - inovasi baru untuk meningkatkan kinerjanya dalam beberapa aspek bisnis. Salah satu pilihan yang dapat diambil oleh lembaga perbankan di Indonesia adalah dengan membuka unit bisnis syariah yang terintegrasi dalam institusi perbankan konvensional, yang sering disebut sebagai *Islamic Window Bank*. (Hasan & Risfandy, 2021).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2024, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) dianggap sebagai upaya strategis dalam mengembangkan dan memperkuat perbankan syariah. Konsep *Islamic Windows* diperkenalkan melalui peraturan yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini memungkinkan bank umum untuk mendirikan unit usaha syariah (Rongiyati, 2015).

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau yang juga dikenal dengan nama Bank Jambi mulai beroperasi pada tanggal 12 Februari 1959. Status PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah, dengan aktivitas yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 yang memuat ketentuan pokok mengenai pendirian, pembinaan, dan pengawasan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan salah satu perbankan di provinsi Jambi yang memiliki unit usaha syariah. Bersamaan dengan meningkatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, pada tanggal 03 Januari 2012 diresmikanlah Unit Usaha Syariah Bank Jambi sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas perusahaan di bidang pelayanan transaksi syariah.

Unit usaha syariah Bank Jambi adalah bagian penting dari Bank Jambi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Unit usaha syariah bertindak sebagai pusat pengendalian untuk kantor atau unit lain yang melaksanakan kegiatan usaha syariah. Pada perkembangan saat ini Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan pilihan bagi banyak bank konvensional yang ingin menikmati buah perkembangan perbankan syariah, banyak keuntungan yang di peroleh dalam pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dari pada harus mendirikan BUS baru, diantaranya biaya yang lebih rendah dan proses yang relatif cepat. Unit Usaha Syariah (UUS) juga mendapatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank induk, baik teknologi, dan jaringan SDM (Al et al., 2022). Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Unit usaha syariah Bank Jambi seperti produk penghimpunan dana diantaranya yaitu tabungan *wadi'ah*, tabungan haji, giro *mudharabah* dan lain-lain. Selain itu ada produk penyaluran dana dengan menggunakan berbagai akad diantaranya yaitu *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna* dan lain sebagainya.

Industri perbankan syariah berperan sebagai entitas keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi tersebut melibatkan pengumpulan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana melalui simpanan dan penyaluran dana untuk membiayai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Proses ini dilakukan

dengan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan bagi hasil, sewa, jual beli dan lainnya. Perbankan syariah menjalankan pembiayaan melalui dua skema utama, yakni transaksi jual beli dan kerjasama. Dalam transaksi jual beli, terdapat tiga akad utama seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Di sisi lain, dalam skema kerjasama, terdapat akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut laporan keuangan perbankan syariah, skema jual-beli menghasilkan pendapatan yang lebih besar. (Syahrizal, 2021).

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual menginformasikan kepada pembeli tentang harga asal barang tersebut (Imansari, 2018). Dalam transaksi ini, bank memperoleh keuntungan dari penjualan yang telah disepakati. Penjual harus menginformasikan harga pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan yang ditambahkan. Pembeli dalam transaksi ini adalah nasabah, sementara penjualnya adalah bank. Kedua pihak harus setuju tentang jangka waktu pembayaran dan harga jual. Harga jual tetap tidak berubah, selama periode akad berlaku.

Dalam pelaksanaan *murabahah*, metode pembayaran cicilan selalu digunakan dalam perbankan syariah. Setelah perjanjian dibuat dan pembayaran dilakukan secara bertahap, proses penyerahan barang dalam transaksi ini akan berlangsung (Karim, 2010). Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan antara pemilik dan penerima dana, dimana pada awal perjanjian kedua belah pihak telah menetapkan sejumlah pembiayaan dan margin keuntungan. Penerima dana dalam akad ini telah menyetujui tingkat margin yang tetap hingga akhir jangka waktu, yang akan dibayarkan secara bersamaan dengan pembayaran pokok pinjaman setiap bulannya (Azka & Hardiwinoto, 2018).

Berdasarkan definisi pembiayaan *murabahah* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam skema pembiayaan *murabahah*, transparansi harga beli dan harga jual beserta keuntungannya merupakan suatu keharusan dan harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Sementara itu, berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan oleh penulis dengan kepala bidang pembiayaan unit usaha syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Ibu Agustini menyatakan bahwa jenis pembiayaan di unit usaha syariah mencakup *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Di antara semua jenis pembiayaan tersebut, komposisi pembiayaan terbesar terdapat pada pembiayaan *murabahah*. Pada unit usaha syariah, akad *mudharabah* biasanya diterapkan dalam tabungan atau simpanan *mudharabah*. Berikut adalah komposisi penyaluran pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi :

Tabel 1. 1 Data Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode Triwulan 2020-2022

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Jutaan Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan <i>Murabahah</i> (%)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Jutaan Rupiah)	Pembiayaan <i>Ijarah</i> (Jutaan Rupiah)
2020	I	533,923		195,656	33,564
	II	535,835	0,36	194,186	40,416
	III	574,089	6,66	194,186	49,702
	IV	568,211	-1,03	199,379	52,337
2021	I	567,413	-0,14	238,177	19,318
	II	551,246	-2,93	267,753	3,714
	III	476,210	-15,75	280,982	1,027
	IV	498,229	4,42	283,469	779
2022	I	496,290	-0,39	286,035	776
	II	498,084	0,36	301,124	542
	III	507,030	1,76	310,296	506
	IV	512,791	1,12	320,949	424

Sumber : (Laporan Publikasi Bank Jambi, n d dan Data Diolah.)

Berdasarkan data pada tabel 1.1. di atas, terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* mengalami *fluktuasi*, sementara pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan secara signifikan. Puncak penyaluran pembiayaan *musyarakah* terjadi pada triwulan IV tahun 2022 dengan nilai 320,949 miliar rupiah, sedangkan penyaluran pembiayaan *ijarah* mencapai puncak sebesar 52,337 miliar rupiah. Meskipun begitu, nilai-nilai tersebut masih relatif kecil bila dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada triwulan III tahun 2020 yang mencapai 574,089 miliar rupiah. Pembiayaan *murabahah* menjadi kontributor utama dalam portofolio pembiayaan pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi selama tiga tahun terakhir. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, penyaluran pembiayaan *murabahah* adalah yang paling mendominasi diantara pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah*.

Menurut Azka & Hardiwinoto (2018) produk pembiayaan menggunakan akad *murabahah* mendominasi karena dianggap lebih sederhana dengan pembagian yang jelas. Produk yang sangat esensial dalam perbankan syariah di Indonesia adalah pembiayaan *murabahah*, karena prosesnya tidak memerlukan analisis yang kompleks dan menghasilkan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah. Menurut (Rohmah & Zuhroh, 2021) pembiayaan *murabahah* lebih dominan daripada jenis pembiayaan lainnya karena beberapa alasan yaitu dari sisi penawaran, *murabahah* mempunyai risiko yang lebih rendah dibandingkan jenis pembiayaan lain. Dari sudut permintaan, pembiayaan *murabahah* dianggap lebih mudah karena operasionalnya mirip dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh bank konvensional, sehingga masyarakat sudah *familiar* dengan proses tersebut. Penerapan pembiayaan *murabahah* saat ini lebih mudah dan jenis pembiayaan ini mempunyai kerugian yang lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pembiayaan lainnya.

Dominasi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek internal, eksternal dan aspek risiko. Aspek internal dapat tercermin melalui laporan keuangan bank, yang dipaparkan melalui rasio-rasio kinerja keuangan. Pada penelitian ini berfokus pada rasio *Financing to*

Deposit Ratio (FDR), rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah*.

Di bawah ini merupakan data terkait dengan variabel yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi :

Tabel 1. 2 Data NPF, FDR, DPK Pada Unit Usaha Syariah Bank Jambi Periode Triwulan 2020-2022

Tahun	Triwulan	FDR (%)	NPF (%)	DPK (Jutaan Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan DPK (%)
2020	I	152,19	0,03	564,670	
	II	111,55	0,04	654,842	13,77
	III	109,52	0,10	699,890	6,44
	IV	93,23	0,05	755,223	7,32
2021	I	93,95	0,07	746,906	-1,11
	II	100,71	0,05	1,029,417	26,92
	III	132,00	0,09	420,565	-144,77
	IV	132,04	0,08	488,852	13,96
2022	I	125,08	0,10	534,711	8,57
	II	122,27	0,07	623,729	14,27
	III	114,66	0,06	613,356	-1,69
	IV	86,77	0,06	802,047	23,52

Sumber : (Laporan Publikasi Bank Jambi, n d dan Data Diolah.)

Dengan merujuk pada tabel 1.2. di atas, terlihat bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami fluktuasi namun mengalami penurunan secara umum. Penurunan paling signifikan terjadi pada triwulan II tahun 2020 yang mencapai angka 40,64%. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi indikator untuk menilai tingkat likuiditas sebuah bank. *Financing to Deposit Ratio* sebenarnya memiliki arti yang sama dengan *loan to deposit ratio* dalam bank konvensional, namun dalam konteks bank syariah istilah ini digunakan untuk menyebut pembiayaan daripada pinjaman. Ketika bank mampu memenuhi

permintaan dana dari nasabah tanpa mengalami penundaan dalam memberikan pembiayaan, maka bank dianggap valid.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Tinggi rendahnya rasio FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah tersebut (Hendriawan et al., 2024). Rasio ini memperlihatkan sejauh mana bank dapat menyeimbangkan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan kapasitasnya untuk memenuhi penarikan dana sewaktu-waktu oleh deposan.

Sebagai institusi keuangan yang terlibat dalam berbagai kegiatan, perbankan memiliki potensi pendapatan yang sangat besar. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, bank selalu menghadapi risiko-risiko tertentu. Risiko-risiko ini, jika tidak dideteksi dan dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Bank berisiko mengalami kredit macet, yang dapat tercermin dari proporsi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang tidak menghasilkan pendapatan (Idroes, 2011).

Data pada tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan sebesar 0,05% pada triwulan IV tahun 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 0,04% pada triwulan III tahun 2021. Tingginya tingkat NPF mencerminkan bahwa kualitas asset bank tidak dalam kondisi sehat (Ismail, 2010). Menurut Hendriawan et al., (2024) Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet akibat keterlambatan nasabah dalam pengembalian pembiayaan kepada bank.

Dana pihak ketiga memiliki peranan yang sangat vital bagi bank dalam proses penghimpunan dana. Bank secara *principal* mengumpulkan dana untuk keperluan usahanya dari sumber-sumber yang melibatkan sumber dana internal bank, dana bank ini mencakup dana yang berasal dari luar institusi, termasuk yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga seperti tabungan dan sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga mencakup dana yang diperoleh bank dari masyarakat, individu atau entitas bisnis. (Ismail, 2010).

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1.1. dan 1.2. terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* pada triwulan III tahun 2021. Penurunan tersebut mencapai - 144,77% untuk dana pihak ketiga dan -15,75% untuk pembiayaan *murabahah*. Menurut Dendawijaya (2009) pembiayaan *murabahah* yang diserahkan akan meningkat seiring dengan total dana pihak ketiga yang dikumpulkan. Sebaliknya, pembiayaan *murabahah* yang diserahkan juga akan berkurang jika dana pihak ketiga berkurang.

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat umumnya menjadi sumber dana yang sangat penting untuk mendukung operasional bank, dan itu menunjukkan seberapa sukses bank jika mereka dapat membiayai operasinya dengan dana ini. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah setiap tahun menyebabkan peningkatan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah. Fenomena ini menunjukkan bukti positif bagi perbankan syariah untuk terus bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat, ini menunjukkan kelebihan perbankan syariah jika disamakan dengan perbankan konvensional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat diukur dengan jumlah dana pihak ketiga. Kenaikan jumlah dana dari pihak ketiga menandakan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sementara penurunan jumlah dana dari pihak ketiga menandakan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut (Ismail, 2010).

Cahaya & Wirman (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Arifin (2022) menyatakan hasil yang berbeda bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Nasution (2019) menyatakan hasil sama yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, namun *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Penelitian Yuniarif, Amaliah, dan Haviz (2019) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sebelumnya, telah dilakukan penelitian serupa, tetapi belum ada penelitian yang secara khusus mengevaluasi dampak ketiga variabel tersebut terhadap pembiayaan *Murabahah* di Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023**” menarik untuk dilakukan sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam konteks literatur keuangan syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023?

4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga secara simultan pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode 2016-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari hasil penelitian ini antara lain meliputi :

1. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dan memperluas pemahaman dalam konteks perbankan syariah terkait FDR, NPF dan DPK dalam pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi input yang berharga dalam upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pada sektor perbankan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi pembaca atau peneliti berikutnya, ini bisa menjadi referensi bermanfaat untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang pengaruh FDR, NPF dan DPK terhadap pembiayaan *murabahah*.